



PERTEMUAN TIONGKOK DAN PAKISTAN

Presiden Tiongkok Xi Jinping bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif di Aula Besar Rakyat di Beijing, Tiongkok, Rabu (2/11).

Korut Kembali Tembakan Rudal Antar-Benua

Korut menembakan satu rudal antar-benua (ICBM) dari tiga tembakannya.

SEOUL(IM) - Kantor berita Yonhap melaporkan Korea Utara (Korut) menembakan satu rudal antar-benua (ICBM) dari tiga tembakannya pada Kamis (3/11). Mengutip militer Korea Selatan (Korsel) Yonhap mengatakan peluncuran kedua mengalami kegagalan di tahapan separasi. Sebelumnya Jepang mengatakan rudal itu terbang di atas wilayahnya tapi kemudian Tokyo mengoreksinya dengan menyatakan hal itu tidak benar. Pemerintah Korsel dan Jepang mengatakan Korut menembakan ICBM, senjata jarak jauh yang dirancang membawa hulu ledak nuklir.

Korut juga meluncurkan dua rudal jarak pendek. Peluncuran ini dilakukan setelah Korut menembakan 23 rudal dalam satu hari termasuk satu rudal yang mendarat di lepas pantai Korsel.

Dalam pernyataannya Kementerian Luar Negeri Korsel

mengatakan Wakil Menteri Luar Negeri Korsel Cho Hyun-dong dan Deputi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Wendy Sherman mengancam tembakan-tembakan rudal Korut. Dalam percakapan melalui sambungan telepon mereka mengatakan peluncuran-peluncuran itu "menyedihkan dan tak bermoral."

Namun setelah tembakan pertama Sistem Peringatan Darurat Jepang, J-Alert meminta warga prefektur-prefektur Jepang tengah, Miyagi, Yamagata, dan Niigata diminta untuk mencari perlindungan di dalam ruangan. Menteri Pertahanan Jepang Yasukazu Hamada mengatakan pemerintah kehilangan jejak rudal itu di Laut Jepang.

Sehingga pemerintah mengoreksi pengumuman sebelumnya yang menyatakan rudal terbang di atas wilayah Jepang. "Kami mendeteksi rudal berpotensi terbang di atas wilayah Jepang dan karena itu memicu J Alert, tapi setelah

jalur terbangnya diperiksa kami mengkonfirmasi rudal itu tidak terbang di atas Jepang," kata Hamada pada wartawan.

Ia mengatakan rudal pertama terbang dengan ketinggian sekitar 2.000 meter dan sejauh 750 kilometer. Pola terbang itu disebut "lofted trajectory" artinya rudal ditembakkan tinggi ke angkasa agar tidak melewati wilayah negara lain. "Tembakan rudal berkali-kali Korut telah memicu kemarahan dan tidak bisa dimaafkan," kata Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida konferensi pers.

Setengah jam laporan tembakan dilaporkan, Penjaga Pantai Jepang mengatakan rudal telah jatuh. Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan rudal jarak jauh ditembakkan di daerah dekat Ibukota Pyongyang. Sekitar satu jam setelah tembakan pertama, militer Korsel dan penjaga pantai Jepang melaporkan tembakan kedua dan ketiga.

Korsel mengatakan tembakan kedua dan ketiga merupakan rudal jarak pendek yang ditembakkan dari Provinsi Kaecheon, utara Pyongyang.

Presiden Korsel mengatakan tembakan rudal Korut telah "melanggar perbatasan" sementara Washington menyebut tembakan itu tindakan "ceroboh."

Sebelumnya, pada Rabu (2/11), Korut menembakkan 10 rudal balistik. Hal ini sebagai tindakan pembalasan atas latihan udara gabungan yang sedang berlangsung oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS).

Menurut militer Korea Selatan, Pyongyang juga menembakkan rudal pertamanya ke daerah yang dekat dengan perairan teritorial Korea Selatan sejak pembagian wilayah semenanjung itu pada tujuh dekade lalu, menurut Kantor Berita Yonhap.

Pyongyang menembakkan sedikitnya 10 berbagai jenis rudal, termasuk tiga rudal balistik jarak pendek (SRBM), di lepas pantai barat dan timur pada Rabu (2/11) pagi, menurut kepala staf gabungan. "Militer kami bersumpah untuk menanggapi dengan tegas (provokasi) ini," tambahnya.

Kemudian, kepala staf gabungan mengkonfirmasi

bahwa militer Korea Selatan juga menanggapi dan menembakkan tiga rudal udara-ke-darat ke laut lepas di utara Garis Batas Utara (NLL), sebuah batas maritim de facto yang memisahkan kedua negara.

Ini adalah pertama kalinya dalam tujuh dekade Korea Utara menembakkan rudal yang terbang melintasi NLL.

Sementara itu, Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol pada Rabu (2/11), mengutuk tembakan rudal terbaru Korea Utara dan memerintahkan militernya untuk siap menghadapi "provokasi" lebih lanjut oleh Pyongyang.

Yoon memimpin pertemuan darurat Dewan Keamanan Nasional dan mengatakan provokasi Korea Utara hari ini secara efektif merupakan pelanggaran wilayah kami oleh rudal yang melintasi NLL untuk pertama kalinya. "Presiden Yoon Suk-yeol memerintahkan agar tindakan tegas diambil dengan cepat untuk memastikan Korea Utara membayar harga yang jelas untuk provokasinya," kata kantor presiden Korea Selatan. ● tom

PM Jepang dan Presiden Jerman Sepakat Kerja Sama untuk Ukraina

TOKYO(IM) - Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier sepakat untuk semakin mengoordinasikan tanggapan kedua negara terhadap invasi Rusia ke Ukraina. PM Jepang dan Presiden Jerman itu berjanji untuk mempertahankan sanksi keras terhadap Rusia.

Pada konferensi pers bersama setelah pertemuan kedua pemimpin di Tokyo, Kishida dan Steinmeier mengatakan bahwa mereka juga mengkonfirmasi bahwa Jepang dan Jerman akan bergandengan tangan untuk menghadapi berbagai tantangan global sebagai ketua dari Kelompok 7 negara industri besar (G7) yang akan datang dan yang saat ini menjabat.

"Sekarang saya sangat merasakan pentingnya kolaborasi erat kami," kata Kishida pada awal pembicaraan. Sementara itu, Presiden Jerman, yang tidak memiliki otoritas pengambilan keputusan, menekankan perlunya memberi tekanan lebih pada Moskow. Beberapa anggota G7 seperti Jepang dan Jerman masih mengimpor energi dari Rusia, termasuk gas alam.

Namun, anggota G-7 yang juga termasuk Inggris, Kanada, Prancis, Italia dan Amerika Serikat serta Uni Eropa telah memimpin upaya internasional untuk menajatkan sanksi ekonomi berat terhadap Ukraina atas perangnya terhadap Rusia yang dilakukan sejak Februari 2022.

Jepang akan mengambil alih jabatan presiden bergilir G7 dari Jerman tahun depan. Pada Selasa (1/11), Kishida dan Steinmeier berjanji untuk bekerja sama menuju keberhasilan konferensi tingkat tinggi (KTT) G7 di Hiroshima pada 2023.

Kishida dan Steinmeier juga membahas kerja sama untuk menuju realisasi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, yakni sebuah visi yang dipromosikan oleh Jepang dan Amerika Serikat dalam suatu perlawanan terselubung terhadap kekuatan militer Tiongkok yang tumbuh di kawasan Asia-Pasifik.

Tokyo dan Berlin telah berpandangan sama bahwa keamanan Eropa tidak dapat dipisahkan dari Asia. Kishida menjadi perdana menteri Jepang pertama yang berpartisipasi dalam pertemuan tingkat tinggi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) pada Juni lalu.

Pada Kamis (3/11), pemerintah Jepang dan Jerman mengadakan pembicaraan keamanan "two-plus-two" di sela-sela pertemuan menteri luar negeri G7 yang dijadwalkan selama dua hari hingga Jumat (4/11) di kota Munster, Jerman barat.

Kunjungan Steinmeier ke Jepang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari mulai Selasa. Steinmeier melakukan perjalanan resmi pertamanya ke negara Asia sejak Oktober 2019 saat dia menghadiri upacara penobatan Kaisar Naruhito di Tokyo.

Steinmeier dua kali menjabat sebagai menteri luar negeri Jerman di bawah pemerintahan mantan Kanselir Jerman Angela Merkel. Dia adalah mitra Jerman untuk Kishida, yang merupakan menteri luar negeri Jepang dari 2012 hingga 2017. Presiden Jerman ditetapkan sebagai kepala negara oleh undang-undang, tetapi secara efektif hanya memiliki peran seremonial tanpa kekuatan politik. Kanselir lah yang menjadi pemimpin politik di Jerman. ● gul

PM Denmark Mengundurkan Diri Sehari Setelah Menang Pemilu

KOPENHAGEN(IM) - Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen, menyerahkan pengunduran diri pada Rabu, (2/11), sehari setelah partai Sosial Demokratnya meraih kemenangan tipis dalam pemilihan umum. Frederiksen mengatakan bahwa dia akan mulai menjajaki koalisi antara kelompok tengah politik.

Frederiksen telah mengampangkan perannya koalisi luas di tengah perpecahan tradisional antara kubu sayap kiri dan kanan. Dia menekankan perlunya persatuan di saat situasi dunia internasional yang tak pasti.

Pembicaraan diperkirakan akan berlangsung lama karena baik teman maupun musuh Frederiksen telah menyatakan skeptisisme tentang koalisi semacam itu, membuat hasilnya tidak pasti. "Ini akan memakan waktu, dan kompromi akan diperlukan," kata Frederiksen dalam debat dengan para pemimpin partai lainnya pada Rabu. Dia

menambahkan bahwa membentuk pemerintahan baru "akan sangat, sangat merepotkan".

"Saya sepenuh hati percaya bahwa dengan krisis iklim, inflasi, perang di Eropa... dan potensi resesi dalam ekonomi Eropa, kita harus mengesampingkan kata-kata kasar dari kampanye pemilihan dan datang ke meja perundingan," katanya sebagaimana dilansir Reuters.

Blok sayap kiri, yang mencakup partai Sosial Demokrat, memenangkan 90 kursi, mayoritas paling tipis di parlemen dengan 179 kursi, sementara blok sayap kanan memenangkan 73 kursi dan partai tengah yang baru dibentuk mendapatkan 16 kursi.

Sosial Demokrat mendapatkan dukungan terkuat mereka dalam dua dekade meskipun ada kritik terhadap Frederiksen karena memiliki kekuasaan terpusat di sekitar kantornya dan keputusan terkait pemusnahan hewan selama pandemi. Profesor ilmu politik di

Universitas Aarhus, Rune Stubager, mengatakan akan sulit menemukan titik temu dengan partai-partai kanan.

Frederiksen dapat memulai negosiasi dengan mantan perdana menteri Lars Lokke Rasmussen dan partai sentris non-blok barunya, Moderat, yang juga telah berkampanye untuk koalisi partai-partai arus utama.

"Saya tidak berpikir Mette Frederiksen memiliki kepentingan nyata dalam pemerintahan yang luas," kata Joachim B. Olsen, mantan anggota parlemen dan sekarang komentator politik untuk surat kabar BT.

Dia memperingatkan bahwa membentuk koalisi partai-partai arus utama tradisional bisa menjadi bumerang, karena pada akhirnya bisa memperkuat partai-partai yang lebih radikal seperti yang terlihat di negara-negara Eropa lainnya, termasuk Prancis. "Kita mungkin menghadapi masa jabatan yang agak kacau, dan mungkin juga singkat," katanya. ● ans



CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO DI SHANGHAI

Foto yang diambil pada 2 November 2022 ini menunjukkan perangkat medis General Electric Company (GE) yang akan dipajang di China International Import Expo (CIIE) kelima yang akan datang di Shanghai, Tiongkok.

Paris Wajibkan Pelaku Bisnis Matikan Lampu di Malam Hari

PARIS(IM) - Pemerintah kota di Paris mengumumkan Rabu (2/11), semua lampu di kantor dan toko akan dimatikan pada akhir hari kerja. Keputusan wajib ini akan segera berlaku dan yang tidak mematuhi akan dikenakan denda.

Menurut laporan jaringan stasiun radio lokal dan regional Prancis France Bleu, bisnis yang tidak mematuhi akan didenda antara 750 hingga 1.500 euro. Pengumuman itu muncul di tengah krisis energi di Eropa yang disebabkan oleh perang Rusia melawan Ukraina.

Untuk mengatasi stok energi yang menipis, pemerintah Eropa mencoba mendiversifikasi pasokan dan memperkenalkan langkah-langkah untuk mengurangi permintaan dan menghemat energi. Pemerintah kota Paris juga akan mematikan lampu di papan iklan antara pukul 23.45. hingga pukul 06.00 waktu setempat mulai 1 Desember.

Sebelum keputusan ini, beberapa kota di Prancis sudah memutuskan untuk mematikan lampu-lampu sebagai penerangan jalan sejak 31 Oktober. Contoh saja lampu di kota Lyon

akan dimatikan antara pukul 02.00 dan 04.30 dari Minggu hingga Rabu setiap minggu.

Banyak desa di Prancis juga mematikan lampu jalan pada dini hari dan banyak otoritas lokal telah memutuskan untuk memajukan waktu mematikan lampu sebelum tengah malam. Menurut laporan pemerintah tentang kesadaran energi yang diterbitkan awal Oktober, penerangan jalan adalah kontributor tertinggi kedua, setelah bangunan umum, untuk tagihan energi pemerintah daerah, mewakili total 31 persen dari pengeluaran.

Tapi Paris telah memutuskan untuk tidak mengurangi penerangan jalan karena alasan keamanan. Asosiasi pejalan kaki menunjukkan, 30 persen kematian pejalan kaki di jalan terjadi pada bulan November, Desember, dan Januari. Asosiasi khawatir jumlah kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki akan meningkat jika pemerintah memutuskan mematikan lampu jalanan. Asosiasi ini telah menyarankan pejalan kaki malam untuk memakai pakaian ringan di malam hari, sehingga mereka lebih mudah dilihat. ● gul

Erdogan Ingin Terus Pertahankan Hubungan dengan Israel

ISTANBUL(IM) - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan pada Rabu (2/11), ingin mempertahankan hubungan dengan Israel berdasarkan saling pengertian. Dia tidak peduli hasil pemilihan Israel yang baru berlangsung.

"Apa pun hasil pemilu, kami ingin menjaga hubungan dengan Israel secara berkelanjutan, berdasarkan saling menghormati kepekaan dan kepentingan bersama," kata Erdogan.

Komentar Erdogan dalam sebuah wawancara dengan penyiar Turki ATV muncul di tengah mencairnya hubungan yang telah lama tegang antara Turki dan Israel. Presiden Israel Isaac Herzog mengunjungi Ankara tahun ini dalam kunjungannya pertama oleh seorang pemimpin Israel sejak 2008.

Hubungan diplomatik dipulihkan pada 2016, tetapi dua

tahun kemudian Turki menarik diplomatnya dari Israel dan mengusir utusan Israel. Tindakan itu terjadi usai pasukan Israel membunuh sejumlah warga Palestina yang telah mengambil bagian dalam protes di Jalur Gaza.

Ketegangan antara kedua negara ini terjadi dalam masa kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Pemilihan kelima dalam waktu empat tahun ini tampaknya akan mengembalikan kekuasaannya yang sempat direbut oleh kelompok sayap kiri-modern.

Netanyahu ditetapkan untuk mendapatkan kekuasaan di salah satu koalisi sayap kanan paling kuat dalam sejarah Israel. Kondisi ini menyebabkan kegelisahan di antara warga Palestina dan tetangga Arab yang khawatir hal itu dapat meningkatkan ketegangan di Timur Tengah. ● ans

PBB Tolak Seruan Rusia Selidiki Dugaan Program Senjata Biologi AS

WASHINGTON(IM) - Dewan Keamanan PBB menolak resolusi yang diajukan oleh Rusia, yang menyerukan penyelidikan atas tuduhan keterlibatan Amerika Serikat dalam dugaan pengembangan senjata biologi di Ukraina. Pekan lalu, Rusia secara resmi telah meminta penyelidikan PBB atas tuduhan tersebut, yang kerap dilontarkannya sejak dimulainya invasi Rusia ke Ukraina.

Dilansir kantor berita AFP, Kamis (3/11), dalam voting DK PBB pada Rabu (2/11) waktu setempat, resolusi tersebut mendapat dua suara mendukung (Rusia dan Tiongkok), tiga suara menentang

menunjukkan dalam segala hal bahwa hukum tidak berlaku untuk mereka. Ini adalah mentalitas kolonial yang biasa kami alami dan kami bahkan tidak terkejut dengan itu," katanya.

Dia berjanji akan kembali ke masalah ini pada konferensi tinjauan Konvensi Senjata Biologi, dari 28 November hingga 16 Desember di Jenewa, Swiss. "AS memilih menentang resolusi ini karena didasarkan pada disinformasi, ketidakjujuran, itikad buruk dan kurangnya rasa hormat terhadap Dewan Keamanan," ujar Duta Besar Amerika Serikat Linda Thomas-Greenfield.

Menurutnya, resolusi tersebut adalah "tonggak untuk penipunan dan kebohongan Rusia" dan "tidak ada yang mempercayainya kecuali Tiongkok. Amerika Serikat dan Ukraina telah dengan tegas menolok tuduhan Rusia tersebut pekan lalu.

AS menyebut tuduhan tersebut sebagai "rekayasa murni." Deputi Perwakilan Tinggi PBB untuk Urusan Perlocutan Senjata, Adeleci Ebo, menegaskan pada saat itu bahwa PBB tidak tahu-menahu tentang program senjata biologi tersebut, dan tidak memiliki mandat atau kapasitas teknis untuk menyelidiki klaim tersebut. ● tom

Populasi Kelahiran Inggris di Luar Negeri Naik 2,5 Juta dalam Satu Dekade

LONDON(IM) - Sensus resmi Inggris mencatat jumlah penduduk Inggris dan Wales yang lahir di luar negeri mencapai 10 juta pada 2021. Angka ini naik dari 7,5 juta dari satu dekade sebelumnya. "Orang-orang yang lahir di luar negeri tetapi sekarang tinggal di Inggris dan Wales berjumlah 16,8 persen dari populasi dua wilayah yang berjumlah 59,6 juta, naik dari 13,4 persen pada 2011," kata Kantor Statistik Nasional Inggris (ONS).

Di London, sejumlah 40,6 persen populasi lahir di luar negeri. Angka ini naik 36,7 persen pada 2011. Data ONS menunjukkan populasi Inggris dan Wales meningkat dengan total 3,5 juta antara sensus 2011 dan 2021.

Perubahan karena migrasi menyumbang sebagian besar pertumbuhan populasi bersih selama periode tersebut. Kesehatan publik tentang migrasi yang cepat dan tidak terkendali dari Uni Eropa adalah salah satu faktor utama dibalik pemilihan Inggris tahun 2016 untuk meninggalkan Uni Eropa.

Sejak itu, kekhawatiran tentang migrasi telah mereda menurut jajak pendapat. Data resmi lainnya menunjukkan migrasi keseluruhan tidak banyak

melambat sejak pembatasan migran Uni Eropa mulai berlaku pada awal 2021, tetapi komposisinya telah bergeser secara nyata ke migran dari luar Uni Eropa. Data sensus Selasa oleh ONS menunjukkan bahwa orang yang lahir di India adalah kelompok terbesar warga negara kelahiran asing atau berjumlah 920 ribu atau 1,5 persen dari populasi Inggris dan Wales.

Paspor non-Inggris yang paling umum adalah Polandia dipegang oleh 760 ribu orang atau 1,3 persen dari populasi. Sementara peningkatan terbesar adalah jumlah orang yang lahir di Rumania, yang naik 576 persen dalam waktu satu dekade menjadi 539 ribu.

Kebangsaan lain di lima besar termasuk orang yang lahir di Pakistan dan Irlandia. Warga negara Uni Eropa merupakan 36,4 persen dari penduduk kelahiran asing di Inggris dan Wales pada tahun 2021, naik dari 32,7 persen pada tahun 2011 dan 30 persen pada tahun 2001. Angka untuk Inggris secara keseluruhan belum tersedia, setelah pemerintah pro-kemerdekaan Skotlandia menunda melakukan sensus hingga awal tahun ini, dengan alasan pandemi Covid-19. ● gul